

Desain Ulang Demokrasi Indonesia: **Reaktualisasi Prinsip Musyawarah-Mufakat**

Tim Editor

Yasraf A. Piliang, Wening Udasmoro. Nurul Ilmi Idrus

SERI DISKUSI TERPUMPUN, KOMISI KEBUDAYAAN AIPI

“Bagaimana Nilai Demokrasi Berbasis Musyawarah Dipraktikkan di Berbagai Daerah di Indonesia”

1. Diskusi Terpumpun (DT) Seri 1: 21 April 2025

“Menata Ulang Demokrasi Indonesia: Dialektika Tradisi Musyawarah-Mufakat dan Demokrasi Modern ”

2. Diskusi Terpumpun (DT) Seri 3: 14 Mei 2025

“Ragam Budaya Musyawarah Nusantara: Landasan Rekonstruksi Makna dan Praktik Demokrasi Indonesia Modern?”

3. Diskusi Terpumpun (DT) Seri 5: 27 Agustus 2025

Ragam Praktik dan Makna Musyawarah dalam Demokrasi Modern Lintas Generasi

Objek

“Musyawarah-Mufakat” dilihat pada dua tataran: (1) Konsep filosofis sebagai fondasi sistem demokrasi Indonesia yang berakar budaya bangsa, dan diartikulasikan di dalam Pancasila; (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam sistem pranata dan tata kelola negara

Masalah

- (1) Ada tarik-menarik dan tegangan antara unsur-unsur demokrasi yang berakar pada budaya lokal di Indonesia dan unsur-unsur demokrasi modern.
- (2) Di satu pihak, praktik musyawarah sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan, yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa, telah dijumpai dan dipraktikkan hingga kini di berbagai kelompok etnis dan masyarakat Nusantara: tudang sipulung (Bugis), pela dan gandong (Ambon), batagak penghulu (Minang)
- (3) Di pihak lain, dalam sistem pemilihan langsung, praktik pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada musyawarah-mufakat, tapi one-man-one-vote, atau prinsip mayoritas.

Asumsi Dasar

- (1) Demokrasi bukan sebuah sistem tunggal, universal, sudah selesai, dan eksis untuk selamanya, melainkan bersifat jamak, relatif, kontekstual, dibentuk oleh semangat zaman, dan selalu dalam proses “menjadi” (becoming).
- (2) Karena itu, demokrasi perlu selalu dipikir dan didesain ulang, dengan melihat komponen-komponennya tidak secara oposisi-biner, tetapi secara ‘dialektis’, untuk menghasilkan sebuah sintesis baru

Pendekatan

- (1) **HOLISTIK.** Melihat unsur-unsur pembangun demokrasi—baik yang berasal dari nilai-nilai budaya tradisi mau pun dari nilai-nilai demokrasi modern—sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling terhubung satu sama lain.
- (2) **DIALEKTIK.** Cara penalaran dan argumentasi sebagai upaya untuk mencari sebuah “sintesis baru” dari nilai-nilai demokrasi yang berakar pada tradisi dan nilai-nilai demokrasi modern.

Medan

Medan pertarungan, setidaknya di antara dua gagasan tentang demokrasi:

- | | | |
|----------------------|----|-------------------------|
| • Demokrasi Langsung | | • Demokrasi Deliberatif |
| • One-man-One-Vote | VS | • Prinsip Musyawarah |
| • Majority Principle | | • Musyawarah-mufakat |

Motif

Menyingkap pemikiran filosofis dan mekanisme pengambilan keputusan berbasis “musyawarah-mufakat”, untuk diintegrasikan dan ditempatkan secara proporsional dan konstruktif di dalam sistem demokrasi modern.

Fakta

- Tradisi musyawarah-mufakat sebagai pranata budaya masih eksis di beberapa suku bangsa di Indonesia hingga kini, yang beberapa di antaranya mengalami modifikasi karena pengaruh dinamika perubahan dalam diskursus dan tatanan demokrasi di tingkat nasional dan global.
- Selain itu, musyawarah-mufakat juga dipraktikkan oleh lintas-generasi. Generasi X, Y dan Z melalui berbagai platform digital, yang memungkinkan mereka berperan sebagai ‘jembatan’ untuk mempertemukan nilai-nilai musyawarah berbasis tradisi dan nilai-nilai demokrasi modern.

Sintesis

- Buku ini mengusulkan “**Demokrasi Multikultural**” sebagai sintesis-dialektik antara nilai-nilai demokrasi berbasis nilai budaya tradisi dan demokrasi modern (Catatan: meskipun ini masih sebagai “ide awal” (sketsa).
- Untuk itu, perlu dibangun secara sistematis pranata yang melandasi praktik demokrasi yang menghargai nilai-nilai multikultural dan penguatan “kebajikan sipil” (civic virtue), melalui pendidikan politik, dengan mengutamakan “pola pikir ilmiah” .

Terima Kasih